

## **Peran Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus: Desa Cipang Kanan Rokan Hulu)**

Salwa Zahratih<sup>1)</sup>, Lara Indah Yandri<sup>2)</sup>, Didi Rahmadi<sup>3)</sup>, Tesha Dwi Putri<sup>4)</sup>, Riko Riyanda<sup>5)</sup>

<sup>1)\*</sup> Prodi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia,  
[zahratihsalwa@gmail.com](mailto:zahratihsalwa@gmail.com)

<sup>2)</sup> Prodi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

<sup>3)</sup> Prodi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

<sup>4)</sup> Prodi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

<sup>5)</sup> Prodi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

### **Abstrak**

Salah satu lembaga penting di desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwakilan di tingkat desa dengan mengumpulkan unsur keterwakilan masyarakat, termasuk perempuan di wilayah. Keterlibatan aktif perempuan pada organisasi organisasi di desa seperti LKD, PKK, Koperasi, dan sebagainya menunjukkan bahwa perempuan memegang peran sentral dalam pembangunan dan kemajuan desa. Sebagaimana diketahui bahwa proporsi BPD yang berjumlah 5 orang, diantaranya diisi oleh perempuan. Asumsinya dengan posisi strategis tersebut, kebijakan yang dihasilkan termasuk lebih diperhatikan. Penelitian ini mengambil lokasi di desa Cipang Kanan, dimana salah satu anggota BPD yakni Trify Suhelny menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan teori Harbany Pasolonguntuk dijadikan patokan dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran perempuan di BPD Cipang Kanan dalam pengambilan kebijakan terealisasi dengan baik, dilihat dari realisasi kebijakan yang dilahirkan oleh keterwakilan perempuan dan didukung penuh oleh seluruh anggota kerja yang mayoritas laki-laki. Kebijakan yang dihasilkan, seperti program penganyaman daun pandan duri, program kesehatan, dan program keagamaan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi perempuan. Program-program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan perempuan, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam pembangunan desa. Melalui partisipasi aktif, perempuan dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan bermanfaat.

Kata Kunci: Kebijakan, Perempuan, Partisipasi.

### **Abstract**

One of the key institutional bodies in rural governance is Badan Permusyawaratan Desa (BPD), which serves as a representative institution at the village level by incorporating elements of community representation, including that of women. The active participation of women in various village organizations—such as Community-Based Institutions (LKD), the Family Welfare Movement (PKK), and cooperatives—demonstrates their central role in driving local development and progress. It is noteworthy that, out of the five BPD members, at least one seat is occupied by a woman. This strategic placement is presumed to enhance the inclusiveness and responsiveness of the policies being formulated. This study was

conducted in Cipang Kanan Village, where a female BPD member, Trify Suhelny, illustrates the significant role of women in the village decision-making process. The study adopts the policy decision-making framework developed by Harbany Pasolong as its theoretical foundation. A qualitative descriptive method was employed to explore the subject matter. Findings from the study indicate that women's involvement in the BPD of Cipang Kanan Village is effectively manifested in policy formulation and implementation. This is evident in the realization of policies initiated through female representation and strongly supported by the predominantly male body of the BPD. Key policies—such as the thorny pandanus leaf weaving program, health initiatives, and religious programs—have had a positive impact on the community, especially for women. These initiatives have not only enhanced women's income-generating capacity but also strengthened their influence in village development. Through active and meaningful participation, women are able to articulate community needs and aspirations, and contribute substantially to the formulation of contextual and impactful policies.

**Keywords:** *policy, woman, partisipation.*

## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang memiliki dampak langsung yang ditemukan dan dirasakan di kehidupan masyarakat, dalam konteks ini, peran perempuan dalam pemerintahan desa menjadi semakin penting (Mekarjaya, 2023). Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan desa memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi lokal. Melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan desa dapat memastikan representasi yang adil dan merata, meningkatkan kualitas keputusan, dan mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara keseluruhan (Manunggal Jaya, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran perempuan menunjukkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sangat masih kurang (Siti Sausan Malida, 2022). Perempuan dan laki-laki merupakan kunci untuk sebuah keberhasilan pembangunan, karena perempuan dan laki-laki memiliki persamaan pemenuhan akses, serta peluang berpartisipasi dalam peran dan posisi pembuatan kebijakan (Audia Jovani, 2024). Keterlibatan perempuan dalam pembangunan sangat rendah. Karena perempuan tidak terlibat secara efektif dalam penyusunan ataupun pembuatan kebijakan (Nila Kusuma, 2023). Seiring dengan berjalannya waktu, kini para perempuan mulai sedikit terlihat hadir dan berperan dalam sistem pemerintahan desa, seperti di Desa Cipang Kanan. Sejak diterapkannya otonomi desa, terdapat dorongan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ditingkat lokal. Otonomi desa memberikan kesempatan bagi masyarakat, termasuk perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pemerintahan desa dan pembangunan desa (Sakinah Nadir, 2013).

Desa cipang kanan ini, salah satu wilayah di kabupaten Rokan hulu menarik untuk menjadi lokasi penelitian karena perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di isi oleh perempuan. Perangkat desa yang berjumlah 11 orang dan satu diantaranya diisi oleh perempuan. Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berjumlah 5 orang, dan satu diantaranya diisi oleh perempuan. Asumsinya dengan posisi strategis tersebut, kebijakan yang dihasilkan termasuk anggaran desa lebih diperhatikan. Kebijakan yang dilahirkan oleh desa cipang kanan antara lain yaitu kebijakan pembangunan desa (infrastruktur desa), kebijakan pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat, kebijakan pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa, dan kebijakan dalam tata kelola

pemerintahan desa. Adapun hal yang menarik dari penelitian ini sehingga peneliti mengambil tema dan memilih lokasi tersebut dikarenakan, pada struktur pemerintahan sebelumnya tidak adanya perempuan yang mengisi bangku pemerintahan desa. Sehingga dengan posisi seperti ini, peneliti ingin melihat peran perempuan dalam pengambilan ataupun pembuatan keputusan/kebijakan di Badan Pemerintahan Desa Cipang Kanan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran seorang perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keterlibatan seorang perempuan dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintahan desa inilah yang kemudian membuat peneliti untuk meneliti bagaimana Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengambilan Kebijakan khususnya tahun 2021.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran perempuan dalam pengambilan keputusan didasari atas bagaimana memberi rujukan kepada orang atau organisasi dalam mengambil keputusan (Harby Pasaleong, 2023). Terdapat beberapa tahap- tahap pengambilan keputusan, yaitu:

1. Penemuan masalah. Tahap ini merupakan tahap dimana masalah harus didefinisikan dengan jelas, sehingga perbedaan antara masalah menjadi jelas
2. Pemecahan masalah. Tahap ini merupakan tahap dimana masalah yang sudah ada atau sudah jelas kemudia diselesaikan dengan langkah langkah sebagai berikut:
  - a. Identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah
  - b. Menganalisis faktor yang tidak dapat diketahui
  - c. Pembuatan alat (sarana) untuk mengevaluasi
  - d. Pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan
3. Pengambilan Keputusan. Keputusan yang diambil berdasarkan pada keadaan lingkungan atau kondisi yang ada kondisi yang ada

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan Taylor menyatakan bahwa penelitian Kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Bogdan dan Taylor dalam Akif Khilmiah, 2016). Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Cipang Kanan, kecamatan Rokan IV koto, kabupaten Rokan Hulu, Riau. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena pada struktur pemerintahan di desa Cipang Kanan kurangnya partisipasi keterlibatan perempuan di ranah parlemen pemerintahan desa. Di dalam penelitian ini penulis berperan sebagai instrument utama, alasannya bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti, masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan yang akan didapatkan belum bisa dipastikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bertujuan untuk menentukan siapa saja informan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Unit analisis yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kelompok, yaitu lembaga pemerintahan desa Cipang Kanan (anggota BPD dan Perangkat desa Cipang Kanan). Adapun metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam

penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya dan merekam suara. Pihak yang akan diwawancarai yaitu, perempuan perangkat desa Cipang Kanan, Perangkat desa Cipang kanan, BP (Badan Permusyawaratan Desa) Cipang Kanan, masyarakat desa Cipang kanan. Wawancara (interview) merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan "Tanya jawab", baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara ini berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Informan pada penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari 1 orang informan into, 5 orang informan tambahan, dan 5 orang informan untuk triangulasi data.

Didalam penelitian ini pengumpulan data dengan wawancara kepada informan yang telah peneliti tentukan dan dari data yang didapatkan peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti akan berupaya menjawab dan menguraikan pengertian analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan bagaimana penarikan kesimpulan data yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tahun 2021 awal mulai munculnya keterwakilan perempuan pemerintahan desa Cipang Kanan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Trify Suhelny selaku perempuan yang sudah menjabat di BPD Cipang Kanan selama kurang lebih 3 tahun. Sebagai seorang perempuan Trify Suhelny beranggapan bahwa perempuan tidak hanya dirumah saja, akan tetapi perempuan sangat boleh untuk berpartisipasi politik. Awal mula motivasi trify Suhelny terbesit ketika menghadiri sebuah acara di desa Cipang Kanan yang diselenggarakan oleh pihak setempat yang melalukan sebuah program kerja seperti seminar yang membahas topik tentang perempuan. Dengan semangat dan niat yang kuat beliau mendiskusikan hal itu bersama keluarga. Selanjutnya, Trify Suhelny meminta izin kepada keluarga untuk mencoba bekerja di BPD Cipang Kanan. Dengan dukungan penuh dari keluarga, Trify Suhelny melamar untuk bekerja di BPD Cipang Kanan dengan mengikuti semua prosedur pendaftaran, persyaratan dan seleksi dalam pemilihan anggota BPD Cipang Kanan.

Peran Trify Suhelny peran perempuan dalam pengambilan keputusan didasari atas bagaimana ia memberikan rujukan kepada orang atau organisasi dalam mengambil keputusan melalui tahap-tahap pengambilan keputusan, pertama perumusan masalah, kedua pemecahan masalah, dan ketiga pengambilan Keputusan.

### **1 Tahapan Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari empat tahap: (a) Pencarian masalah, (b) pendefisiaan masalah, (c) spesifikasi masalah, (d) pengenalan masalah. yang baik (Harbany Pasalong, 2023).

- a) Pada tahap ini, anggota BPD Cipang Kanan termasuk Trify Suhelny, melakukan identifikasi dan pemahaman konteks masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Pencarian masalah yang efektif sangat penting karena menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Misalnya, dalam konteks Desa Cipang Kanan, pencarian masalah dapat mencakup identifikasi isu-isu seperti kurangnya pendapatan perempuan atau rendahnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Dengan memahami konteks masalah secara mendalam, anggota BPD Cipang Kanan dapat merumuskan masalah dengan lebih tepat.

- b) Pada tahap pendefinisian masalah, berbagai solusi potensial dihasilkan dan dievaluasi. Setelah masalah teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah ~~pendefinisian masalah~~. Pada tahap ini, anggota BPD Cipang Kanan menghasilkan dan mengevaluasi berbagai solusi potensial. Proses ini melibatkan kreativitas dan pemikiran kritis untuk mengeksplorasi berbagai alternatif yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Seperti, jika masalah yang dihadapi adalah kurangnya pendapatan perempuan, alternatif solusi yang mungkin diusulkan adalah program pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi. Pendefinisian masalah yang baik akan membantu anggota BPD Cipang Kanan untuk memahami berbagai opsi yang tersedia dan memilih solusi yang paling sesuai.
- c) Pada tahap ini, fokus beralih kepada penyempurnaan definisi masalah. Anggota BPD Cipang Kanan berusaha untuk memastikan kejelasan dalam perumusan masalah dengan mengubah masalah yang lebih luas menjadi komponen yang dapat dikelola. seperti, jika masalah yang dihadapi adalah "kurangnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan," spesifikasi masalah dapat mencakup aspek-aspek seperti "kurangnya akses perempuan terhadap informasi tentang pemilihan" atau "stigma sosial yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi." Spesifikasi masalah yang ditetapkan dengan baik dapat meningkatkan kualitas keputusan secara signifikan dengan menyelaraskan proses pengambilan keputusan.
- d) Pada tahap pengenalan masalah, tahap akhir yang melibatkan pengakuan keberadaan masalah dan implikasinya. Pengakuan ini penting untuk memobilisasi sumber daya dan memulai tindakan. Pengenalan ini sering dipengaruhi asumsi yang dapat mempengaruhi bagaimana masalah dipersepsikan dan ditangani. Pada tahap ini, anggota BPD Cipang Kanan mengakui keberadaan masalah dan implikasinya bagi masyarakat. Pengakuan ini penting untuk memobilisasi sumber daya dan memulai tindakan. Misalnya, setelah mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, anggota BPD Cipang Kanan perlu mengkomunikasikan masalah tersebut kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Pengenalan ini sering dipengaruhi oleh asumsi yang dapat mempengaruhi bagaimana masalah dipersepsikan dan ditangani. Oleh karena itu, penting bagi anggota BPD Cipang Kanan untuk menyampaikan masalah dengan cara yang jelas dan meyakinkan agar dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat.

## 2. Tahapan Pemecahan Masalah

Merujuk dari teori yang disampaikan oleh Harbany Pasolong mengenai pengambilan keputusan/kebijakan, yaitu pada tahap selanjutnya pemecahan masalah. Tahap ini merupakan tahap dimana masalah yang sudah ada dan sudah jelas kemudian diselesaikan dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a) Identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Proses ini mencakup curah pendapat solusi potensial dan membangun representasi mental dari masalah, yang membantu dalam menghasilkan opsi yang komprehensif. Keterwakilan perempuan berperan aktif dalam tahap pemecahan masalah. Dalam identifikasi alternatif keputusan, perempuan anggota BPD Cipang Kanan berkontribusi dengan mengemukakan berbagai solusi potensial yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui diskusi yang melibatkan hasil pendapat,

keterwakilan perempuan mampu membangun representasi mental yang komperenshif mengenai masalah yang dihadapi desa.

- b) Menganalisis faktor faktor yang tidak dapat diketahui. Pada tahap ini, pengambil keputusan harus mempertimbangkan ketidakpastian dan variable yang tidak diketahui dan dapat mempengaruhi keputusan. Dalam proses ini melibatkan evaluasi keterbatasan informasi yang tersedia dan mengenali sifat subjektif dari pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi pemilihan alternatif. Peran perempuan di BPD Cipang Kanan menunjukkan kemampuan untuk mempertimbangkan ketidakpastian yang mungkin mempengaruhi keputusan. Mereka secara kritis mengevaluasi keterbatasan informasi yang ada dan menyadari sifat subjektif dari pengambilan keputusan, yang memungkinkan mereka untuk memberikan perspektif yang lebih luas dalam proses tersebut.
- c) Pembuatan alat (sarana) untuk mengevaluasi. Penetapan kerangka kerja untuk mengevaluasi alternatif sangatlah penting. Infrastruktur ini mencakup kriteria untuk menilai kelayakan dan efektifitas setiap opsi, memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan analisis struktur dan bukan hanya instusi. Tahap pembuatan alat untuk mengevaluasi, perempuan BPD Cipang Kanan berperan dalam menetapkan kriteria yang jelas untuk menilai kelayakan setiap alternatif yang diusulkan. Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada intuisi tetapi juga pada analisis terstruktur.
- d) pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan. Dalam pemilihan dan penggunaan, para pengambil keputusan memilih model yang tepat untuk menciptakan pilihan mereka. Secara sistematis yang ditetapkan sehingga proses pengambilan keputusan lebih terinformasi. Di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan, perempuan anggota BPD memilih pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi. Sehingga nantinya proses pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan menjadi lebih jelas dan mencerminkan kepentingan seluruh anggota masyarakat, salah satunya suara perempuan yang selalu terabaikan.

Pemecahan masalah sangatlah penting agar pengimplementasian suatu kebijakan/keputusan dapat berjalan baik dan efektif. Pemecahan masalah disini ialah tahap setelah perumusan masalah. Kemudian dalam pemecahan masalah, nantinya melahirkan pengambilan dan pembuatan suatu kebijakan/keputusan. Hal yang dimaksud adalah apakah kebijakan/keputusan dapat terelisasi dengan sangat baik atau tidak. Pemecahan masalah dilakukan dengan diskusi, komunikasi, musyawarah, secara bersama melalui forum komunikasi seluruh anggota yang terlibat dalam pembuatan kebijakan/keputusan. Dalam pemecahan masalah di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan, selingkup anggota melakukan prosedur mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, evaluasi, dan terakhir proses pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif dalam musyawarah adalah kunci dalam proses pemecahan masalah di BPD Cipang Kanan. Baik Trify Suhelny maupun Didit menekankan pentingnya diskusi terbuka yang melibatkan semua anggota, termasuk perempuan, untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi dan partisipasi adalah elemen penting dalam pengambilan keputusan yang efektif.

### **3. Tahapan Pengambilan Keputusan**

Dalam hal proses pengambilan keputusan/kebijakan yang dilahirkan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan, Sebagaimana yang dimaksud oleh Harbany Pasolong yaitu, pada tahap pertama ini dimana pencarian masalah dengan benar. Merujuk dari hal tersebut maka dalam penelitian ini, tahapan pencarian masalah dilakukan dengan

komunikasi antara sesama anggota BPD Cipang Kanan. Komunikasi dalam pencarian masalah menjadi hal yang berperan penting dalam tercapainya tujuan dalam pengambilan kebijakan/keputusan dan lancarnya proses pengambilan kebijakan/keputusan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan dan pengimplementasian berjalan efektif sesuai dengan tujuan keterwakilan peran perempuan dalam proses pengambilan kebijakan di Desa Cipang Kanan kecamatan Rokan IV Koto kabupaten Rokan Hulu.

Pada proses perumusan kebijakan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan benar bahwasanya ketika perumusan masalah seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah bersama dengan sistem mulai dari pencarian masalah, pemecahan masalah, spesifik masalah dan selanjutnya pengenalan masalah secara bersama tanpa membedakan-bedakan antara laki laki ataupun perempuan. Semua saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu keputusan/kebijakan yang efektif untuk dilahirkan di desa Cipang Kanan terutama di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan.

- a) Identifikasi Masalah. Trify Suhelny memulai perjuangannya dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh perempuan di Desa Cipang Kanan, terutama terkait dengan pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi. Ia melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan diskusi dengan masyarakat untuk memahami tantangan yang mereka hadapi.
- b) Pengembangan Solusi. Setelah mengidentifikasi masalah, Trify mengusulkan program ekonomi berbasis pengolahan daun pandan duri sebagai solusi. Ia merancang program pelatihan keterampilan untuk perempuan agar mereka dapat memanfaatkan potensi lokal ini.
- c) Diskusi dan Perdebatan. Trify menyadari bahwa tidak semua anggota BPD sepakat dengan usulannya. Oleh karena itu, ia mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan program tersebut. Dalam pertemuan ini, anggota BPD lainnya menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka, yang menciptakan dinamika diskusi.
- d) Mencari Kesepakatan. Trify berusaha untuk mendengarkan semua pendapat dan mencari titik temu. Ia mengajak anggota BPD untuk bersama-sama mengevaluasi manfaat dan tantangan dari program yang diusulkan. Melalui musyawarah, mereka berusaha mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Berdasarkan wawancara dengan keterwakilan perempuan, ketua BPD, dan anggota BPD menjelaskan bahwa dalam setiap perumusan masalah melakukan tahap tahap sesuai prosedur. Mulai dari pencarian masalah, pemecahan masalah, spesifik masalah dan pengenalan masalah sehingga nantinya tercipta suatu kebijakan/keputusan efektif secara bersama. Musyawarah dan komunikasi merupakan hal penting dilakukan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV koto Kabupaten Rokan Hulu.

## **PEMBAHASAN**

Keterlibatan awal perempuan dalam tata kelola desa Cipang Kanan mencerminkan pergeseran bertahap namun signifikan menuju representasi politik lokal. Sejak tahun 2021, partisipasi perempuan ditandai dengan keterwakilan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang sangat penting untuk pengambilan kebijakan/keputusan bagi masyarakat. Keterlibatan ini dibentuk dari berbagai faktor, termasuk kerangka hukum dan upaya keterlibatan masyarakat.

Keterwakilan perempuan dalam BPD diamanatkan untuk melibatkan perempuan, dengan peraturan yang menyarankan setidaknya ada satu keterwakilan perempuan. Di desa Cipang Kanan kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Perempuan mulai menduduki peran dalam BPD. Sebelumnya keterwakilan perempuan belum ada sama sekali. Karena selalu ada stigma bahwa perempuan tidak bisa berpartisipasi di instansi pemerintahan desa. Sesuai perkembangan zaman kini peran keterwakilan perempuan di pemerintahan desa sudah mulai muncul walau hanya sedikit.

Trify Suhelny, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipang Kanan, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperjuangkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama perempuan. Proses perjuangan ini melibatkan beberapa tahapan yang kompleks. Trify Suhelny, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipang Kanan, memulai perjuangannya dengan melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya perempuan. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, Trify mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka. Ia menemukan bahwa banyak perempuan di desa mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan mereka dan merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memperkuat pemahamannya tentang masalah yang ada, Trify mengadakan forum diskusi dengan perempuan di desa. Dalam forum ini, ia mengumpulkan data dan informasi mengenai kebutuhan mereka, serta mendiskusikan berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hasil dari forum ini menunjukkan bahwa perempuan sangat membutuhkan pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka menghasilkan produk yang bisa dijual. Berdasarkan hasil identifikasi dan pengumpulan data, Trify mulai merumuskan program yang relevan. Ia mengusulkan program pelatihan keterampilan menganyam daun pandan duri sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan perempuan. Program ini dirancang untuk memberdayakan perempuan dan memberikan mereka keterampilan yang dapat digunakan untuk menciptakan produk yang bernilai ekonomi.

Sebelum mengajukan program secara resmi, Trify melakukan musyawarah dengan anggota BPD lainnya dan perangkat desa. Dalam diskusi ini, ia mempresentasikan ide programnya dan meminta masukan dari anggota lain. Proses musyawarah ini penting untuk mendapatkan dukungan dan memastikan bahwa program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah mendapatkan persetujuan dari anggota BPD dan perangkat desa, Trify menyusun proposal resmi untuk program pelatihan keterampilan. Proposal ini mencakup tujuan, manfaat, dan rencana pelaksanaan program. Dalam rapat resmi BPD, Trify mempresentasikan proposal tersebut dan menjelaskan pentingnya program ini bagi pemberdayaan perempuan di desa.

Proposal yang diajukan oleh Trify mendapatkan dukungan dari anggota BPD dan kepala desa. Setelah disetujui, Trify berperan aktif dalam proses implementasi program. Ia memastikan bahwa pelatihan berjalan sesuai rencana dan melibatkan perempuan dalam setiap tahap pelaksanaan. Berikut beberapa kebijakan Trify yang pro terhadap perempuan di Desa Cipang Kanan.

**Tabel 1.**  
**Kebijakan Pro-Perempuan di Desa Cipang Kanan**

No	Nama Kebijakan	Spesifikasi Kebijakan	Tujuan
1.	Program Pertumbuhan Ekonomi	Kegiatan menganyam daun pandan duri untuk menghasilkan produk yang dapat dijual.	Meningkatkan pendapatan perempuan, terutama bagi yang paruh baya dan tidak memiliki suami.
2.	Program Senam Sehat	Kegiatan senam sehat untuk meningkatkan kesehatan fisik perempuan.	Meningkatkan kesehatan dan kebugaran perempuan di desa.
3.	Program Peningkatan Gizi	Program edukasi tentang gizi dan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui.	Meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan kesehatan ibu dan anak.
4.	Program Majelis Dakwah	Kegiatan dakwah dan pengajian untuk perempuan.	Meningkatkan pengetahuan agama dan spiritualitas perempuan.

Kinerja Trify Suhelny di BPD dalam mengeluarkan kebijakan di Desa Cipang Kanan menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidaklah instan. Melalui berbagai tahapan yang kompleks, Trify berhasil melahirkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat di instansi pemerintahan desa Cipang Kanan, semenjak adanya posisi keterwakilan perempuan beberapa kemajuan sudah terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat desa Cipang Kanan yaitu dengan adanya program program yang sudah dilahirkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

## **PENUTUP**

Pengambilan keputusan/kebijakan yang dilakukan di pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan, kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu merupakan dengan teori yang digunakan oleh Harbany Pasolong yaitu mulai dari perumusan masalah, pemecahan masalah melalui musyawarah sehingga nantinya menghasilkan sebuah keputusan/kebijakan secara hasil bersama.

Peran Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan: Keterlibatan perempuan, khususnya Trify Suhelny sebagai anggota BPD, menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui partisipasi aktif, perempuan dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan bermanfaat.

Proses Pengambilan Kebijakan: Proses lahirnya kebijakan di BPD Cipang Kanan mengikuti tahapan yang sistematis, yaitu perumusan masalah, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Setiap tahapan melibatkan diskusi dan musyawarah antara anggota BPD, yang mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Kebijakan yang dihasilkan, seperti program penganyaman daun pandan duri, program kesehatan, dan program keagamaan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi perempuan. Program-program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan perempuan, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam pembangunan desa.

Meskipun terdapat kemajuan dalam keterlibatan perempuan di pemerintahan desa, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti stigma sosial yang menganggap perempuan tidak mampu berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap peran perempuan dalam pemerintahan.

Penelitian ini merekomendasikan agar BPD Cipang Kanan terus mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Selain itu, perlu dilakukan program-program pelatihan dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapasitas perempuan dalam berpartisipasi di ranah publik.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Jivani, Audia. *Perlindungan Perempuan Dan Anak, Peran Pembuatan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Kebijakan Responsive Gender*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta 2024.

Khilmiyah, Akif. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Kusuma Nila, *Riset Sosiologi Progresif Aktual, keterlibatan perempuan desa dalam pembangunan, universitas matarram*, Vol 05, No 1 juni 2023.

Malida, Siti Sausa. *Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan*. UIN Ar-Ranyri, Aceh, 2022.

Moleong, Lexi. J. 2012. *Metode Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya.

Manunggaljaya, *Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Desa*, 25 Mei 2024, <https://manunggaljaya-tenggarongseberang.desa.id/info-keuangan/infografis-realisisi-apbdes/realisasi-2022/>

Nadir Sakinah, *Otonomi Daerah dan desentralisasi desa menuju pemberdayaan masyarakat desa*, Vol, 1, 2013.

Pasolong, Harbani. 2023. Teori Pengambilan Keputusan. Bandung: Alfabeta.

Webdesaku Mekarjaya, Kiarapedes, Pemerintahan desa Mekarjaya, Peran pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat, 1 maret 2023, <https://mekarjaya.purwakarta.desa.id/read/30496>